

Peran Perempuan Dalam Strategi Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Sampangan Dan Bendan Dhuwur Semarang

Women's Role In Flood Mitigation Strategies In The Sampangan Sub-District and The Bendan Dhuwur Sub-District of Semarang

Landung Esariti

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Abstrak: Artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman yang dilakukan penulis dalam kegiatan pendampingan *Building Resilience through the Integration of Gender and Empowerment* (BRIGE). Program ini didanai oleh MERCYCORPS dan dilaksanakan secara serial di 6 kelurahan di Kota Semarang, dalam waktu 1 Oktober – 13 November 2016. Kelurahan Sampangan dan Bendan Dhuwur merupakan salah dua kelurahan yang didapati mempunyai karakteristik yang unik untuk dipelajari terkait dengan peran perempuan dalam strategi penanggulangan banjir. Analisis gender digunakan sebagai metode analisis, yang meliputi (a) bagaimana tanggung jawab dan kewajiban yang diemban, (b) akses terhadap sumber daya, (c) proses pengambilan keputusan, (d) mobilitas waktu, (e) norma sosial dan budaya yang dianut, (f) institusi dan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan ada 2 jenis pola peran perempuan terkait dengan perannya dan kedudukannya dalam keluarga inti. Pola pertama berhubungan dengan perannya sebagai agen penguatan kapasitas kelompok/organisasi perempuan. Pola kedua terkait pada aset individu yang mendominasi dasar pengambilan keputusan serta akses terhadap sumber daya. Disamping itu, diketahui pula bahwa terjadinya perbedaan pola peran perempuan juga terkait dengan jenis hubungan sosial yang terjadi di masyarakat. Tingkat hubungan kekeluargaan di Kelurahan Bendan Dhuwur terbukti cenderung lebih tidak akrab/guyub dibandingkan dengan Kelurahan Sampangan.

Kata kunci: peran; perempuan; banjir; pembangunan kapasitas

Abstract: This article was written based on the experience in conducting community service actions from the MERCYCORPS-funded Building Resilience via the Integration of Gender and Empowerment (BRIGE). This program was implemented serially in 6 urban villages in Semarang City, from October 1 to November 13, 2016. Sampangan and Bendan Dhuwur are among the urban villages found to have unique characteristics to be studied in relation to the role of women in flood prevention strategies. Gender analysis is used as a method of analysis, which includes (a) role and responsibilities, (b) access to resources, (c) decision-making processes, (d) time mobility, (e) social and cultural norms, and (f) applicable institutions and policies.

As the results, there are two types of female role patterns related to their role and position in the nuclear family. The first pattern relates to its role as an agency for strengthening the capacity of women's groups / organizations. The second pattern relates to individual assets that dominate the basis of decision making process and access to resources. To be concluded, it is also evidenced that the difference in women's role pattern is also related to the level of social relations that occurs in society. Bendan Dhuwur proved to have more individual relationship within community compared to that in Sampangan.

Keywords: role; women; flood; capacity building

Pendahuluan

Dewasa ini pengarusutamaan gender menjadi salah satu pilar pembangunan yang wajib diimplementasikan dalam setiap kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya bagaimana menemukan strategi yang dibentuk dalam pencapaian tujuan pembangunan lainnya, seperti keberlanjutan dan keadilan sosial. Berdasar pada pernyataan tersebut, Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan MERCYCORPS mengadakan kegiatan pendampingan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah mengajak masyarakat di lokasi rawan banjir untuk menemukan tindakan apa saja yang telah dilakukan saat menghadapi banjir, baik itu banjir bandang (*flash flood*) maupun banjir periodik/musiman. Hal ini untuk menarik pembelajaran dalam penyusunan strategi pengendalian banjir berbasis komunitas local yang lebih efektif.

Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan skala kecil, dengan anggota maksimal 7 orang per grup. FGD dilakukan kepada 4 grup yang berbeda yang ada di lokasi target, yaitu grup ibu ibu, bapak bapak, remaja putra dan remaja putri. Teknik diskusi dilakukan secara terpisah untuk mengantisipasi jawaban dapat dikemukakan secara bebas oleh masing-masing grup tanpa terpengaruh oleh keberadaan grup lain. Aspek utama yang menjadi pembahasan meliputi 3 tahapan yaitu : 1) akses terhadap sumberdaya, 2) strategi penanganan banjir, dan 3) organisasi yang terlibat.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, salah satu faktor penting yang menjamin kesuksesan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah adanya motivasi untuk berubah menuju kondisi lebih baik. Ini terkait dengan aspek peningkatan kapasitas individu yang menjamin tumbuhnya kesadaran untuk melakukan rencana aksi bermanfaat untuk pengembangan lingkungan sebagai respon mencegah bencana banjir terjadi lagi. Seandainya pun banjir tersebut datang secara periodik, setidaknya masyarakat sudah mampu membuat tata laksanaanya, menyiapkan semua secara sistematis dan terencana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan kapasitas individu penting dalam perumusan strategi kesiapsiagaan bencana berbasis gender, karena dapat menjamin implementasi strategi menjadi efektif, menuju pada keberlanjutan program dan merangsang tumbuhnya pemberdayaan secara individu maupun kolektif.

Metode

Pendekatan deskriptif komparatif digunakan sebagai acuan dalam perumusan *lesson learned* dari kegiatan tersebut. Artinya pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan, selanjutnya diverifikasi dengan perbandingan terhadap literatur yang relevan untuk dapat diformulasikan peningkatan kapasitas individu dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana.

Partisipan dipilih dengan teknik purposif, terarah pada beberapa kelurahan yang sudah ditentukan. Informasi kontak person dan lokasi diperoleh secara *snowballing* dari staf kelurahan dan tokoh masyarakat setempat. Total responden yang terlibat sekitar 109 orang. Fokus pelaksanaan kegiatan BRIGE ada pada upaya yang dilakukan oleh individu dan keluarga dalam merespon bencana banjir. Bagaimana pengalaman masing masing grup responden secara signifikan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak bencana di masa datang. Walaupun dilakukan pada beberapa kelurahan, namun hasil dan pembahasan dalam artikel ini tidak membahas temuan secara detail apa yang ada dalam tiap kelurahan, melainkan fokus pada karakteristik temuan dan faktor-faktor yang berpengaruh. Analisis gender digunakan sebagai metode analisis, yang meliputi (a) bagaimana tanggung jawab dan kewajiban yang diemban, (b) akses terhadap sumber daya, (c) proses pengambilan keputusan, (d) mobilitas waktu, (e) norma sosial dan budaya yang dianut, dan yang terakhir menganalisis jenis (f) institusi dan kebijakan yang berlaku.

KajianLiteratur

A. Peran Perempuan

Adapun pengertian peran yang dikemukakan oleh Suratman adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu sebagai status aktifitas yang mencakup peran domestik maupun peran publik (dalam Wulansari : 2011). Menurut Hubies (dalam Alghaasyiyah : 2014) bahwa analisis alternatif pemecahan atau pembagian peran wanita dapat dilihat dari perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai pengelola urusan rumah tangga, partisipan pembangunan dan pekerja pencari nafkah. Jika dilihat dari peran wanita dalam rumah tangga, maka dapat digolongkan, antara lain:

1. Peran Tradisional

Peran ini merekomendasikan bahwa perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga.

Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang. Ibu merupakan sosok yang paling menentukan dalam membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan.

2. Peran Transisi

Adalah peran wanita yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja wanita atau ibu disebabkan karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, wanita dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada. Sedangkan di bidang industri, peluang bagi wanita untuk bekerja sebagai buruh industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi wanita yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak wanita untuk mencari nafkah.

3. Peran kontemporer

Adalah peran dimana seorang wanita hanya memiliki peran di luar rumah tangga atau sebagai wanita karier. Peran ini adalah peran yang mulai banyak ditemukan di Kawasan perkotaan, termasuk juga di lokasi studi artikel ini. Astuti dalam (Alghaasyiyah : 2014) menambahkan pengertian dan definisi lain mengenai peran gender, yang pada umumnya terbagi menjadi:

1. Peran produktif

Peran produktif pada dasarnya hampir sama dengan peran transisi, yaitu peran dari seorang wanita yang memiliki peran tambahan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Peran produktif adalah peran yang dihargai dengan uang atau barang yang menghasilkan uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Peran ini diidentikkan sebagai peran wanita di sektor publik, contohnya adalah petani, penjahit, buruh, guru, pengusaha.

2. Peran domestik

Pada dasarnya hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja peran ini lebih menitikberatkan pada kodrat wanita secara biologis dan tidak dapat dihargai dengan nilai uang/barang. Peran ini terkait dengan kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu pada saat mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat dari seorang ibu. Peran ini pada akhirnya diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Peran sosial

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumah tangga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran wanita merupakan tata laku atau fungsi seorang wanita yang dijalankan sesuai kewajibannya sebagai seorang perempuan secara kodrati maupun secara konstruksi sosial.

B. Definisi Strategi

Manusia pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, memiliki insting untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap mempertahankan hidupnya dalam berbagai kondisi. Hal ini merupakan konsep awal dari strategi, dimana setiap orang selalu menggunakan berbagai taktik untuk bertahan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pengertian strategi adalah rencana untuk melakukan tindakan.

Menurut Crow (dalam Dharmawan, 2007) strategi adalah pilihan yang diambil dari banyak alternatif yang ada dan merupakan bagian dari teori pilihan rasional. Strategi merupakan bagian dari pilihan rasional, artinya setiap pilihan yang dibuat oleh individu, dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Selanjutnya Crow (dalam Dharmawan, 2007) menyatakan ada beberapa aspek penting dalam strategi, yaitu:

1. Harus ada pilihan yang dapat seseorang pilih sebagai tindakan alternatif.
2. Kemampuan melatih "kekuatan". Mengikuti suatu pilihan berarti memberikan perhatian pada pilihan tersebut. Dengan demikian, memberikan perhatian pada suatu pilihan akan mengurangi perhatian pada pilihan yang lain. Dalam konteks komunitas, seseorang yang memiliki lebih banyak kontrol terhadap sumber daya / modal akan lebih memiliki kekuatan untuk "memaksa" kehendak. Oleh karena itu, strategi nafkah dapat dipandang sebagai suatu kompetisi untuk mendapatkan sumberdaya yang ingin dikuasai.
3. Dengan merencanakan strategi yang mantap, ketidakpastian (posisi) yang dihadapi seseorang dapat dieliminir.
4. Strategi dibangun sebagai respon terhadap tekanan yang hebat yang menerpa seseorang.
5. Harus ada sumber daya dan pengetahuan sehingga seseorang bisa membentuk dan mengikuti berbagai strategi yang berbeda.
6. Strategi biasanya merupakan keluaran dari konflik dan proses yang terjadi dalam rumah tangga.

Strategi yang dikembangkan saat rumah tangga mengalami kondisi krisis, diperjelas kembali oleh Herbon (dalam Dharmawan, 2007) dengan membagi tahapan krisis menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Tahapan antisipasi krisis, strategi yang dilakukan adalah meliputi kegiatan untuk membangun jaringan sosial yang memberikan jaminan keamanan materil dan immateril, strategi produksi, dan strategi akumulasi surplus.
2. Tahapan terjadinya krisis, dihadapi dengan strategi eksploitasi sumber daya seoptimal mungkin, mengurangi konsumsi, dan melakukan strategi perlawanan (pemberontakan).
3. Tahapan pemulihan krisis, diisi dengan aktivitas memperbaiki kerusakan dan mengusahakan kembali akses terhadap sumberdaya.

Hasil dan Pembahasan

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perencanaan Mitigasi Bencana mengandung pengertian serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan utama perencanaan mitigasi bencana adalah pengurangan resiko dengan mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana, diyakini dapat dilakukan dengan indikator keberdayaan sesuai konsep pengarusutamaan gender, yang meliputi akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya secara adil dan

setara (Murtakhamah, 2013). Fokus pada artikel ini bukan pada mitigasi yang disiapkan sebelum bencana terjadi, melainkan pada kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana, salah satunya adalah bahwa program yang dikembangkan dewasa ini direkomendasikan untuk memberikan penekanan pada peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat (baik laki laki maupun perempuan) serta aktor-aktor lain yang dilibatkan dalam pengelolaan bencana (Haryono et al, 2012). Kesiapsiagaan merespon bencana berhubungan dengan tingkat kerentanan masyarakat (Arora - Jonsson, 2011). Dalam hal ini, perlu dilihat secara detail siapa saja kelompok masyarakat yang terlibat, bagaimana mereka mampu mengakses dan mengelola sumber daya yang ada untuk upaya minimalisasi dampak setelah banjir terjadi. Ini yang dimaksud dengan upaya integrasi gender, yaitu bagaimana kebutuhan masing masing kelompok masyarakat dilihat berdasarkan atribut individu yang tentunya akan menciptakan respon yang berbeda. Atribut yang dimaksud adalah faktor faktor yang mempengaruhi respon individu seperti tugas-tanggung jawab-peran, tingkat pendidikan, norma yang berlaku, relasi sosial antar individu dalam masyarakat, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta pemahaman individu terhadap agama dan kepercayaan (Narayan, 2005, Demetriades and Esplen, 2008, Kabeer and Huq, 2010).

Dalam perspektif gender yang perlu dipahami adalah bagaimana pengaruh sistem sosial dalam pembagian tugas dan tanggungjawab dalam level individu, keluarga maupun masyarakat. Sehingga integrasi gender pada mitigasi bencana akan berbeda di tiap daerah tergantung bagaimana tipe masyarakat dan norma yang berlaku. Menurut RECOFTC (2014) sensitivitas gender adalah kemampuan mengenali isu terkait gender, termasuk di dalamnya bagaimana aspirasi dan persepsi dari masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Secara detail, dapat pula diartikan, bagaimana perencanaan mitigasi bencana difokuskan pada: 1) Peningkatan fleksibilitas untuk transparansi dan partisipasi pada kelompok rentan masyarakat, 2) Peningkatan akses terhadap informasi yang tersedia dan bagaimana mereka mengolah informasi dan 3) kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Aspek dominan lain yang harus dipahami adalah bagaimana relasi gender yang berlaku, apakah menganut paham keibuan (matrilinisme) atau paham kepapakan (patrilinisme). Perencanaan mitigasi bencana berbasis gender, dengan demikian menjadi fleksibel dan kontekstual agar setiap perencanaan kegiatan menjadi tepat sasaran. Dengan karakteristik masyarakat yang dinamis, integrasi gender menjadi hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kegiatan efektif.

Kapasitas adalah kata yang bersifat multidimensional. Kapasitas dapat juga dilihat dari aspek proses dan outcome dari suatu kegiatan. UNDP (2005) dalam Amaratuga (2014) menyebutkan:

capacity building as the creation of an enabling environment with appropriate policy and legal frameworks, institutional development, including community participation, human resources development and strengthening of managerial systems.

Merujuk pada pengertian diatas, kapasitas adalah sebuah sistem yang melibatkan tingkatan organisasi dalam masyarakat. Mulai dari level individu, keluarga, lingkungan dan pemerintah untuk bekerjasama saling menguatkan dan mendukung kepada pencapaian tujuan tertentu. Pada level individu, pengertian kapasitas menurut JICA (2004) dalam Matachi (2006) adalah niat dan kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan utilisasi ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki.

Kata kunci dalam definisi kapasitas individu adalah pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Termasuk di dalamnya beberapa sifat pembentuk individu seperti aset /materi yang dimiliki, pola perilaku, tingkat kesehatan, kondisi psikologis dan dimensi politik. Suarez-Balcazar (2008) mengidentifikasi 4 aspek signifikan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kapasitas individu dalam organisasi. Pertama, adalah membiarkan individu/keluarga mengidentifikasi kebutuhannya. Dalam aspek ini, tingkat pendidikan relatif mempengaruhi pada cepatnya proses pemahaman terhadap identifikasi kebutuhan. Bagaimana individu dapat merumuskan, apa potensi, masalah, ancaman dan peluang yang dimiliki serta sejauh mana kontribusi dapat diberikan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Kedua, menciptakan rasa kepemilikan terhadap kegiatan melalui interaksi yang diciptakan dalam keseluruhan proses. Besarnya usaha, partisipasi, buah pikiran dan inovasi yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat, khususnya individu dan masyarakat akan membuat rasa ingin memiliki (*sense of belonging*) terhadap kegiatan dan pada akhirnya akan membentuk kepemilikan (*ownership*). Dampaknya adalah, adanya upaya terus menerus untuk memberikan yang terbaik agar kegiatan dapat tercapai secara efektif.

Ketiga selalu menggunakan pola pendekatan partisipatif untuk setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Artinya, kegiatan berasal dari ide dari masyarakat untuk mengembangkan lingkungannya. Bagaimana misalnya upaya-upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak banjir dengan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat. Pendekatan partisipatif dapat dilakukan apabila syarat pertama, yaitu identifikasi kebutuhan telah berhasil dilakukan. Adanya identifikasi kebutuhan yang terarah, akan memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap individu dalam masyarakat berkontribusi dan bekerjasama menciptakan kondisi yang diharapkan. Pendekatan partisipatif juga berarti munculnya upaya kemandirian dan pemberdayaan, bahwa untuk seterusnya kegiatan dapat diusahakan dan dikerjakan dengan sumber dana dan sumber daya internal, tanpa adanya ketergantungan yang relatif tinggi terhadap bantuan dana dan sumber daya dari pihak luar.

Keempat, menjamin bahwa suara mereka didengar. Rasa dihargai dan diapresiasi terhadap kontribusi yang sudah dilakukan, akan memicu individu untuk terus memperbaiki diri dan percaya diri untuk mengembangkan pribadi ke arah yang lebih positif. Suarez-Balcazar (2008) menambahkan bahwa interaksi antara individu dan level organisasi di

atasnya juga penting. Bagaimana interaksi antara individu dan organisasi dapat berlangsung secara dua arah agar mereka belajar untuk saling memberi masukan yang terkait dengan kesiapan, kesadaran dan ketrampilan untuk bisa merumuskan penanganan bencana sesuai kebutuhan lokal.



Gambar : Tahapan Respon dalam Pengurangan Resiko Bencana
Sumber : United Nation, 2002

Laporan akhir BRIGE (IRDEM and MERCYCORPS, 2016) menyimpulkan temuan pada 3 aspek pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu aspek sumber daya, strategi penanganan banjir dan organisasi yang terlibat. Pada aspek akses terhadap sumber daya, diketahui hanya 4 sumber daya yang dianggap mempengaruhi respon masyarakat terhadap banjir yang terjadi. Yaitu aspek fisik, pembiayaan, sumber daya manusia dan aspek sosial. Dua aspek lain, yaitu aspek alam dan politik terbukti tidak penting dan tidak mempengaruhi secara signifikan. Secara umum, banjir yang terjadi di Kelurahan Sampangan, Bendhan Dhuwur, Bulu Lor dan Panggung Kidul adalah banjir periodik yang disebabkan oleh buruknya saluran drainase. Beberapa responden menceritakan pengalaman dalam merespon *banjir bandang* yang terjadi pada tahun 1991. Sesuai dengan sifatnya yang periodik dan dapat diantisipasi, maka sebagian besar strategi yang dilakukan bersifat respon langsung.

Pada aspek kedua, terkait dengan strategi penanganan banjir yang dilakukan, tata laksana menghadapi banjir sudah menjadi bagian dari pembelajaran teknis yang dapat dilakukan, dan sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan gender. Misalnya, kebutuhan untuk melakukan evakuasi didominasi oleh kaum lelaki karena perlunya digunakan kekuatan fisik. Sementara respon setelah bencana terjadi seperti proses pembersihan rumah, mengamankan benda dan surat berharga, menjamin ketersediaan makanan menjadi tugas kaum perempuan, yang dianggap lebih tahu bagaimana menjaga aset berharga milik keluarga. Sekaligus juga menjamin agar kondisi rumah menjadi nyaman dan sehat kembali untuk ditinggali setelah banjir surut. Sedangkan strategi lain yang bersifat pemulihan dan mitigasi banjir dikerjakan secara bersama sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawab antara suami, istri dan anggota keluarga lain.

Walaupun suami saya tidak berada di rumah ketika banjir terjadi, saya tidak khawatir. Saya tahu bahwa Pak RT akan membantu saya dan anak-anak. Di lain waktu, saat setelah banjir surut dan sebagian besar penduduk kampung menderita penyakit menular seperti muntaber, saya yang kebetulan punya kenalan dokter, dapat mengupayakan bantuan pengobatan untuk mereka (wawancara masyarakat Kelurahan Sampangan, Oktober 2016).

Banjir di sini datang sewaktu waktu, artinya ketika hujan lebat turun, dan selokan penuh dapat dipastikan bahwa 15 menit kemudian rumah saya pasti kebanjiran. Untungnya suami saya sudah menyiapkan papan dan plastisin, sehingga bisa saya gunakan untuk menanggul air di depan pintu masuk. Awalnya kami sekeluarga memanfaatkan pasir yang dimasukkan dalam karung dan batu bata. Tapi pernah kejadian, saat banjir datang dan saya sendirian di rumah, saya tidak mampu membuat tanggul dari karung pasir karena tidak kuat mengangkatnya (wawancara masyarakat Kelurahan Bendan Dhuwur, November 2016).

Aspek ketiga tentang keterlibatan organisasi menjelaskan siapa saja organisasi yang memiliki komitmen untuk mendukung masyarakat mencapai sasaran secara efektif. Organisasi yang mempunyai peran penting untuk menjamin keberhasilan kesiapsiagaan bencana adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Diketahui pula bahwa, tingkat partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan di luar urusan domestik, dapat dikatakan relatif mencukupi. Dengan kata lain, inisiasi dan ide pengembangan lingkungan rumah berasal dari sebagian besar ide mereka, namun

untuk memutuskan jenis kegiatan apa saja yang layak dilakukan dan juga tenaga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didominasi oleh kaum lelaki.

Amaratungga (2014) menyampaikan bahwa keberhasilan pengembangan kapasitas pada tingkat lokal menjamin efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan yang baik. Peningkatan kapasitas akan menjadi salah satu indikator distribusi barang dan jasa, serta capaian *good governance* menjadi akuntabel. Proses peningkatan kapasitas adalah inklusi kegiatan identifikasi terhadap potensi dan kelemahan serta ancaman dan peluang yang ada. Termasuk didalamnya pemahaman terhadap konteks karakteristik lokal setempat seperti norma sosial, agama dan budaya yang berlaku. Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan kegiatan dapat tercapai dan memberi manfaat seluas luasnya (Muhadjir, 1998).

Apabila diamati dalam pelaksanaan kegiatan BRIGE, yang menekankan pada respon masyarakat (grup laki laki dan perempuan) terhadap kesiapsiagaan banjir dalam perspektif gender, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan melihat pada bagaimana masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan jenis strategi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kemudian masing-masing individu memanfaatkan sumber daya yang ada demi pencapaian strategi tersebut. Lebih spesifik, proses kolaborasi pengetahuan, ketrampilan, pembagian peran dan tanggungjawab ini yang disebut dengan peningkatan kapasitas individu. Peningkatan kapasitas individu mendorong keberlanjutan program, mengingat 2 alasan. Pertama, karena ada unsur kepemilikan (*ownership*) sehingga menjamin *sense of belonging* dan mengandung unsur kearifan local (Hagelsteen and Becker, 2014). Kedua, pemahaman kearifan local termasuk di dalamnya adalah memahami bagaimana kondisi dari aspek sumberdaya, sosial, psikologis dan politik (Narayan, 2005) mempengaruhi hubungan antar individu dalam komunitas yang secara tidak langsung akan mempengaruhi manfaat perkembangan (*development outcomes*). Termasuk di dalamnya karena memahami gender, jadi betul-betul dipilah kebutuhan antar kelompok masyarakat. Proses pengambilan keputusan dan respon menghadapi banjir menjadi suatu tanggungjawab Bersama yang dilaksanakan tanpa beban, sehingga menjadi lebih efektif. Tentunya efektif juga termasuk meminimalkan korban bencana, karena adanya komunikasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Siapa memerlukan apa, dan harus bagaimana berkontribusi dapat diterjemahkan dengan baik dan dibagi dalam peran yang menggambarkan kekuatan masing masing anggota keluarga dan kelompok masyarakat korban banjir.

Dalam tatatan ideal, pencapaian implementasi tersebut, mengundang beberapa beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya:

1. Adanya tenaga ahli yang kompeten yang terus menunjang proses peningkatan kapasitas individu (Crisp, 2000). Kapasitas yang dipahami sebagai proses, akan memberikan efek domino bertambahnya kepintaran individu dalam komunitas. Hal ini pada akhirnya akan memahami dan membuka peluang adanya kesempatan kesempatan untuk berkembang. Ini juga berarti akan mampu menyusun strategi dan respon terhadap bencana secara mandiri.
2. Ada pembagian yang jelas tugas dan tanggungjawabnya (Hagelsteen and Becker, 2014) Ini akan memunculkan kesadaran, motivasi dan keberanian untuk berperan yang lebih dalam kegiatan komunitas. Tentunya juga perlu ada latihan untuk tugas-tugas lain, termasuk didalamnya memahami tugas dan peran yang berbeda antara kelompok pria dan wanita atau kelompok marginal.

Pelaksanaan kesiapsiagaan banjir di kedua lokasi penelitian, membuktikan bahwa terjadi pembagian pekerjaan dengan baik. Prinsip yang dilakukan oleh hamper seluruh masyarakat adalah pengakuan (*acknowledgement*). Mengakui bahwa tiap kelompok masyarakat dan bahkan fasilitator / tenaga ahli memiliki kelemahan dan keterbatasan, sehingga Kerjasama untuk menemukan potensi unggul dari masing-masing pihak yang terlibat telah membuktikan terjadinya peningkatan kapasitas individu / organisasi. Pembelajaran ini walaupun sederhana mengajarkan kita untuk melihat pada konteks efektivitas strategi bukan hanya pada pencapaian tujuan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat merespon banjir, tetapi juga bagaimana eksplorasi potensi dan kejujuran mengakui keterbatasan menjadi jembatan terbukanya komunikasi yang saling menguntungkan.

Kesimpulan

Pertama, bencana dirasakan bersama oleh masyarakat tetapi kebutuhan dan dampak dirasakan secara berbeda oleh masing-masing jenis kelamin dan umur. Kedua, pelibatan perempuan dan laki-laki sebagai subyek program penanggulangan bencana akan semakin memberdayakan organisasi kemasyarakatan, memaksimalkan kapasitas terutama perempuan dalam hal mengenal ranah publik, meningkatkan kecakapan dan ketrampilan dalam berbagai bidang sehingga kerentanan perempuan dan laki-laki dapat diturunkan yang akan menyumbang kepada berkurangnya risiko bencana. Ketiga, pengarusutamaan gender dalam program pengurangan risiko bencana menjadi hal yang mutlak dilakukan bagi para staf organisasi, pendamping lapangan, pembuat program, pengambil keputusan maupun masyarakat pada umumnya untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat mengambil manfaat secara adil, setara dan bermartabat dari program-program penanggulangan bencana.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih diberikan kepada MERCYCORPS dan IRDEM yang telah memberikan kesempatan keterlibatan dalam kegiatan ini. Sebagian data diambil dari Laporan Akhir *GENDER ASSESSMENT REPORT: Building Resilience through Integrated Gender Empowerment (BRIGE), Gender Assessment Report on Zurich Program in the City of Semarang, Indonesia* yang dibuat oleh IRDEM and Mercy Corps Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alhaasyiyah, Nauri. 2014. Kontribusi Wanita Pemulung dalam Mendukung Perekonomian Keluarga (Skripsi). Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Wulansari, Puji. 2011. Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Dharmawan. AH. 2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor
- Matachi, Atsushi. 2006. Capacity Building Framework, United Nations Economic Commission for Africa P.O.Bo x 3001, Addis Ababa, Ethiopia
- Juni 2001. Bappenas. Indikator Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Diambil dari http://www.bappenas.go.id/files/2513/8146/2080/buku-2-indikator-gender-untuk-perencanaan-pembangunan_20130712144305_3833_0.pdf
- Murtakhamah, Titin. Pentingnya Pengarustamaan Gender dalam Program Pengurangan Resiko Bencana. *Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol 2 No 1 Juni 2013.
- Suarez-Balcazar, Yolanda. 2008. Capacity Building and Empowerment : A panacea and challenge for agency-university engagement. *Gateways : International Journal of Community Research and Engagement*. No 1 : 179-196
- Haryono, Tri Joko Sri et al. Juli 2012. Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir. *Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol 25 No 3 Universitas Airlangga
- Demetriades, Justina and Espen, Emily. The Gender Dimensions of Poverty and Climate Change Adaptation. *Institute of Development Studies Bulletin* Vol 39 no 4 September 2008
- Kabeer, Naila and Huq, Lopita. The Power of Relationships: Love and Solidarity in a Landless Women's Organisation in Rural Bangladesh. *Institute of Development Studies Bulletin* Vol 41 no 2 March 2010
- Amaratunga, Dilanthi. October 2014. Capacity Building Framework for Disaster Risk Reduction. University of Salford, Manchester. Diambil dari http://www.salford.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0008/394532/Capacity-building-framework-for-Disaster-Risk-Reduction.pdf
- Liberato et al. Measuring capacity building in communities : a review of the literature. *BMC Public Health*. 2011, 11 : 850. <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/850>
- Crisp, Beth R. Four approaches to capacity building in health: consequences for measurement and accountability. 2000. *Health Promotion International* Vol 15 No 2. Oxford University Press
- Magnus, Hagelsteen and Per, Becker. Forwarding a Challenging Task: Seven Elements for Capacity Development for Disaster Risk reduction. *GRF Davos Planet@Risk*. April 2014. Vol 2 No 2
- RECOFTC. Januari 2014. Gender dalam REDD. Bangkok
- Rostanty, Mayaet Mayaet al. Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah. *Policy Brief Sesi 2*. Editor Novi Anggraini. Mei 2012. PATTIRO
- Arora-Jonsson, Seema. 2011. Virtue and Vulnerability : discourses on women, gender and climate change. *Global Environment Change*. Vol 21 :744-751
- IRDEM and Mercy Corps Indonesia. Desember 2016. Gender Assessment Report: Building Resilience through Integrated Gender Empowerment (BRIGE). Gender Assessment Report on Zurich Program in the City of Semarang, Indonesia
- Darwin, Muhadjir (Eds). (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. W.Dunn. (Trans). Pittsburgh: Prentice-Hall, Inc. (Original Work Published. 1981/1994)
- Bappenas. 2012. Buku 5 : Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Nasional
- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perencanaan Mitigasi Bencana
- Yuliani, Sri et al. September 2015. Policy Brief. Mengurangi Tingkat Kerentanan Bencana Melalui Kebijakan Mitigasi Berbasis kebutuhan Gender : Studi di Provinsi Jawa Tengah. UNS Solo.